UNIVERSITAS GADJAH MADA
**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.
**Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

Agustino Leo, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Renada Media Group, Semarang.

_____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Barkatullah Teguh Prasetyo Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Fahhan A Muchaddam, dkk., *Perdaganagan Orang, Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban*, Azza Grafika, Yogyakarta.

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Firdous, 2004, *Respon LSM Terhadap Perdagangan Perempuan*, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.

Gosita Arif, 1985, *Kumpulan Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

Hiariej Eddy O.S., 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Idrus Muhammad, 2007, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*, UII Press, Yogyakarta.

Jurdi Fajlurrahman, 2017, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta.

Kerlinger, 1996, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, diterjemahkan Landung R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.
**Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Koentjaningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Gramedia, Jakarta.

Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,* PT. Refika Aditama, Bandung.

Marzuki Peter Mahmud, 1983, *Motodelogi Riset*, PT. Hanindita Offest, Yogyakarta.

_____, Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta.

Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhjad M. Hadin dan Nunung Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer,* Genta Publishing, Yogyakarta.

Nuh Mohammad, 2005, *Jejaring Anti Trafficking (Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan),* Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.

Nuraeny Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Bandung.

_____, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalamPrespektif Hak Asasi Manusia*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Raharjo Satjipto, 2000, *Ilm Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Rahayu Ani Sri, 2018, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Remmelink Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

S. C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.

Subarsono Ag., 2013, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.
**Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Sudira I Ketut, 2020, *Hak Reparasi Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Prespektif Viktimologi*, UII Press, Yogyakarta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suharto Edi, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung.

Sumardjono Maria SW, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunarso Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika Jakarta.

Widiartana G., 2009, *Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Wignjosoebroto Soetandyo, 2002, *Hukum: paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Elsa dan Human, Jakarta.

Winarno Budi, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Caps, Yogyakarta.

Yulia Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

## B. Karya Ilmiah

Ahmad Sofian, dkk, "Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak (Kasus Sumatra Utara)", Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2006.

Almaarif Mahmud, "Kebijakan Penal dan Non Penal Keimigrasian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Andrika Farosa, 2015, "Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Perkara Nomor:

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.
**Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

489/Pid.Sus/2013/PN.TK.)", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung.

Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn and Rolando V. del Carmen, "*Toward a New Methodology for Legal Research in CriminalJustice"*, Journal of Criminal Justice Education Volume 21 Nomor 1, April, 2010.

Jumiati, "Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurisprudane,* Vol 5, No. 1, Maret, 2015.

Materi Perkuliahan Metodologi Penelitan Hukum Oleh Dr. Supriadi, S.H., M.Hum., 13 September 2019.

Palmira Permata Bachtiar, *Desentralisasi Pengelolaan Migrasi nternasional Memecahkan Masalah di Hulu,* Lembaga Penelitian SMERU, No. 31 Mei-Jul, 2011.

Rahmah Daniah Dan Fajar Apriani, "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional" , Politica, Vol. 8, No. 2, November, 2017.

Sari Dian Kartika, "perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak dalam tinjuan hukum*",* makalah disampaikan pada semiloka sehari *woman trafficking* dalam perspektif agama dan budaya, Jakarta, 8 Agustus 2002.

Sri Wiyanti Eddyono dkk, "Laporan Penelitian Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan-Indonesia (Nunukan, Sambas, Kapuas Hulu, dan Sanggau)", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM), 2020, Penelitian akan dipublikasi.

Zaky Alkazar Nasution, 2008, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*)", *Tesis,* Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.

## C. Peraturan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.
**Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang *Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.
**Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang *Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang *Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang *Kementrian Sosial*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029*, Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang*, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 40.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.
**Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Tengaga Kerja Indonesia*, Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang *Gugus Tugas, Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu. Peran Serta Masyarakat dan Tata Cara Pengawasan Pencegahan Perdagangan Orang*, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 64.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang *Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 60.

## D. Wawancara

Data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTB, 13 Februari 2020

Lalu Tajuddin, Dinas Ketenagakerjaan Lombok Barat, wawancara Pra Penelitian, 19 Juli 2019.

Wawancara dengan Agus Suprman Ketua RPTC Dinas Sosial NTB, 31 Januari 2020.

Wawancara dengan Endang Susilawati Kepala P2TP2A Provinsi NTB, 3 Februari 2020.

Wawancara dengan Huan ID Sekretaris Dinas Sosial Provinsi NTB, 6 Februari 2020.

Wawancara dengan Ida MD Kartana, staf LBH APIK NTB, 5 Februari 2020.

Wawancara dengan Mahendrayani DPW SPMI NTB, 11 Februari 2020.

Wawancara dengan Norman Adhiguna PLT. Kepala BP3TKI Mataram, 3 Februari 2020.

Wawncara dengan IPTU Endro Yudi Sasmoko Ditreskrimum Polisi Daerah Provinsi NTB, 4 Februari 2020.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.
**Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

## E. Internet

Asosiasi LBH APIK Indonesia, "Sejarah", *https://lbhapik.or.id*, diakses 9 Maret 2019.

Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Maret Tahun 2019", *http://www.bnp2tki.go.id/*, diakses 23 Oktober 2019.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Agama" *https://ntb.bps.go.id*, diakses 10 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Geografis", *https://ntb.bps.go.id*, diakses 10 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Indeks Pembangunan Manusia", *https://ntb.bps.go.id*, diakses 10 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Kependudukan" *https://ntb.bps.go.id*, diakses 10 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Transportasi", *https://ntb.bps.go.id*, diakses 10 Maret 2020.

Bibit Santoso, "Menyikapi Perdagangan Manusia", *https://nasional.kompas.com*, diakses 18 Maret 2019.

Dinas Sosial Provinsi NTB, "Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang", *https://sosial.ntbprov.go.id*, diakses 3 Maret 2020.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, "Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat", *https://disnakertrans.ntbptov.go.id/*, diakses 5 Maret 2019.

International Organization For Migration in Indonesia, "Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja", *https://indonesia.iom.int*, diakses 18 Oktber 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Koordinasi", *https://kbbi.web.id*, diakses 1 Juni 2020.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.
**Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Penanganan", *https://kbbi.web.id*, diakses 20 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "penelitian", *www.kkbi.co.id*, diakses 25 Juni 2020.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018", *https://id.usembassy.gov*, diakses 18 Oktober 2019.

Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, "P2TP2A", *https://kemenpppa.go.id*, diakses 9 Maret 2019.

Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, "Tugas dan Fungsi P2TP2A", *https://kemenpppa.go.id*, diakses 9 Maret 2019.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Berkenalan Dengan Sasambo", *https://gln.kemdikbud.go.id*, diakses 10 Maret 2020.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Bank Data Perlindungan Anak", *https://bankdata.kpai.go.id*, diakses 23 Oktober 2019.

Redaksi Inside Lombok, "1.200 Orang jadi Korban Perdagangan Manusia, 500 diantaranya Asal NTB", *https://insidelombok.id*, diakses 2 Oktober 2019.

Serikat Buruh Migran Indonesia, "Apa itu SBMI", *https://sbmi.or.id*, diakses 11 Maret 2019.

Serikat Buruh Migran Indonesia, "TKI NTB Rentan Menjadi Korban PerdaganganOrang", *http://sbmi.or.id*, diakses 2 Oktober 2019.

Sinonimkata, "Penanganan", *http://www.sinonimkata.com*, diakses 20 Oktober 2019.

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, "Statistik Kriminal 2018", *https://www.bps.go.id*, diakses 30 Oktober 2019.